

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**NURHAYATI
2019.MM.1.2269**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**NURHAYATI
2019.MM.1.2269**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Oleh:

**NURHAYATI
2019MM12269**

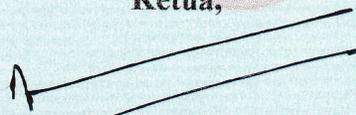
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 27 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

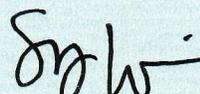
1999

Komisi Pembimbing

Ketua,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Anggota,

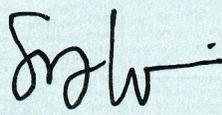

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Mengetahui:

Direktur PPS ITB Nobel Indonesia,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Ketua Prodi Magister Manajemen,


Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

HALAMAN IDENTITAS**MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI****JUDUL TESIS:**

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Nurhayati
NIM : 2019MM12269
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. Maryadi, S.E., M.M.
Anggota : Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Asniwati, S.E., M.M.
Dosen Penguji 2 : Dr. Hari, S.IP., SH., M.Si., MH.
Tanggal Ujian : 27 Agustus 2021
SK Penguji Nomor : 032/SK/PPS/STIE-NI/IV/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2021

Mahasiswa,



Nurhayati
2019MM12269

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”** dapat diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan dan pembahasannya juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.** selaku Rektor ITB Nobel Indonesia Makassar.
2. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Direktur Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar.
3. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar.
4. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku anggota Komisi Pembimbing yang

telah bersedia membimbing, menyumbangkan masukan dan saran serta kritikan untuk kesempurnaan tesis ini.

5. Keluarga yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama kuliah sampai penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Program Pascasarjana Program Studi Manajemen ITB Nobel Indonesia Makassar, atas bantuan yang telah di berikan selama ini, kiranya akan menjadi bekal hidup dalam mengabdikan ilmu saya dikemudian hari.
7. Teman sejawat mahasiswa prodi Magister Manajemen PPs ITB Nobel Indonesia Makassar atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang manajemen dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Amin.

Makassar, 2021

Penulis

Nurhayati
2019MM12269

ABSTRAK

Nurhayati. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dibimbing oleh Maryadi dan Sylvia Sjarlis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian Intern secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2)) pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian Intern secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (3) variabel yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey. Penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tersebar pada 36 SKPD. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dengan kriteria Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 orang.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan $t_{hitung} = 2,183, 3,782$ dan $2,021 > t_{tabel} = 1,994$ (2) secara simultan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dimana $F_{hitung} = 29,871 > F_{tabel} = 2,74$ (3) variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari nilai determinasi yang paling besar yaitu 0,437.

Kata kunci: *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*



ABSTRACT

Nurhayati. 2021. *The Effect of Financial Statement Presentation, Accessibility of Financial Statements and Internal Control on Accountability of Regional Financial Management in the Government of West Sulawesi Province, supervised by Maryadi and Sylvia Sjarlis.*

This study aims to determine and analyze (1) the effect of financial statement presentation, financial statement accessibility and internal control partially on the accountability of regional financial management in the West Sulawesi Provincial Government (2) the influence of financial statement presentation, financial statement accessibility and internal control simultaneously on accountability of regional financial management in the Provincial Government of West Sulawesi (3) the dominant variable influencing the accountability of regional financial management in the Provincial Government of West Sulawesi.

This approach uses survey research conducted in the West Sulawesi Provincial Government from July 2021 to August 2021. The research population is all employees in the West Sulawesi Provincial Government spread over 36 SKPD. Determination of the sample in this study by purposive sampling with the Financial Management Officer (PPK) and the Expenditure Treasurer criteria to obtain a total sample of 72 people.

The test results show that (1) partially the financial statement presentation variables, financial statement accessibility and internal control have a significant positive effect on the accountability of regional financial management in the West Sulawesi Provincial Government with count = 2.183, 3.782, and 2.021 > table = 1.994 (2) simultaneously financial statement presentation variables, financial statement accessibility and internal control have a significant positive effect on regional financial management accountability in the West Sulawesi Provincial Government where Fcount = 29.871 > Ftable = 2.74 (3) the financial statement accessibility variable has the most dominant influence on financial management accountability area in the Government of West Sulawesi Province seen from the value of the most significant determination is 0.437.

Keywords: *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Internal Control, Accountability of Regional Financial Management.*



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Penyajian Laporan Keuangan.....	19
2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	24
2.4 Sistem Pengendalian Intern.....	27
2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	32
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1 Kerangka Konseptual	38
3.2 Hipotesis Penelitian.....	40
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	40
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Desain Penelitian.....	45
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian	46
4.4 Instrumen Penelitian.....	46
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
4.6 Skala dan Pengukuran Data	47

4.7 Teknik Analisa Data.....	48
4.7.1 Uji Prasyarat Analisis	49
4.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	50

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	54
5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	54
5.1.2 Deskripsi Data	56
5.1.3 Deskripsi Responden	58
5.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian	61
5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	80
5.1.6 Uji Instrumen Penelitian	81
5.1.7 Uji Prasyarat Analisis	87
5.1.8 Analisis Regresi Linear Berganda	92
5.1.9 Uji Hipotesis	94
5.2 Pembahasan.....	99
5.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	100
5.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	102
5.2.3 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	105
5.2.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	108
5.2.5 Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	109

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	111
6.2 Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner	57
Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel 5.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	61
Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap Penyajian Laporan Keuangan	62
Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan	66
Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap Pengendalian Intern.....	69
Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	76
Tabel 5.9 Statistik Deskriptif	80
Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1).....	82
Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)..	83
Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X3)	84
Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).....	85
Tabel 5.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	87
Tabel 5.15 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test	90
Tabel 5.16 Uji Multikolinearitas	91
Tabel 5.17 Analisis Regresi Linier Berganda	93
Tabel 5.18 Uji Parsial (Uji T)	95
Tabel 5.19 Uji Simultan (Uji F)	98
Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	39
Gambar 5.1 Visi Misi Pembangunan 2017 - 2022.....	56
Gambar 5.2 Grafik Histogram.....	88
Gambar 5.3 <i>Normal Probability Plot</i>	89
Gambar 5.4 Uji Heteroskedastisitas.....	92

DAFTAR LAMPIRAN**LAMPIRAN 1 : SURAT IZIN PENELITIAN****LAMPIRAN 2 : KUESIONER PENELITIAN****LAMPIRAN 3 : TABULASI DATA****LAMPIRAN 4 : HASIL ANALISIS DATA**

1. DESKRIPSI RESPONDEN
2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN
 - A. UJI VALIDITAS
 - B. UJI RELIABILITAS
4. UJI ASUMSI KLASIK
 - A. UJI NORMALITAS
 - B. UJI MULTIKOLINIERITAS
 - C. UJI HETEROSKEDASTISITAS
5. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
 - A. UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI T)
 - B. UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN (UJI F)
 - C. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya. Mardiasmo (2016:20) menjelaskan pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integrasi keuangan dan ketaatan terhadap undang-undang.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi pada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Hal ini dinyatakan dalam undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa

akuntabilitas merupakan salah satu dari beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 2014).

Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas (Wahida, 2015).

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2017 Nomor: 63.C/LHP/XVIII.MDN/06/2018 tertanggal 27 Juni 2018 lalu, BPK RI (Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) menemukan 36 kasus masing-masing 19 (sembilan belas) kasus ketidakpatuhan dan kecurangan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan 17 (tujuh belas) kasus kelemahan dalam sistem pengendalian intern pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD periode Tahun Anggaran 2014-2018, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh permasalahan aset yang belum diselesaikan secara menyeluruh dan tata kelola laporan keuangan yang kurang baik. Bahkan menurut BPK RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat pelanggaran atau nilai temuan diatas angka *Planing Materiality*.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Hehanussa, 2015).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017:4). Sedangkan menurut Mustofa (2012:3) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik (Hahenus, 2015:84). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Penyajian laporan keuangan daerah yang konperhensif adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik (Superdi, 2017:2016). Pemerintah daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban laporan keuangannya kepada masyarakat. Saat ini, pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan dan kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014:4).

Keberadaan *website* Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni <https://www.sulbarprov.go.id/> merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan

akuntabilitas pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui *website* tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai aktivitas pemerintah dan perkembangan kegiatan pelaksanaan APBD (*e-monev*), layanan sistem pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui link LPSE serta data-data penting lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Walaupun begitu masih banyak data-data penting yang belum bisa diakses (belum tersedia) dalam sub menu “Transparansi Info” pada menu “Pemerintah” yakni data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah seperti laporan neraca dan realisasi anggaran, DPA SKPD, laporan APBD, laporan rencana umum pengadaan, serta link LPSE (*eprocurement*) yang masih belum bisa diakses sampai saat ini.

Mustafa (2012) dan Sande (2013) menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna Laporan keuangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) dan Riyansa et al. (2015) menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2016). Pengukuran akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan tahap pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal pertanggungjawaban yang berkaitan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan tidak sesuai akibatnya dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tidak optimal dan boros atau tidak hemat serta pertanggungjawaban dalam pembuatan suatu kebijakan tidak mempertimbangkan tujuan dan kebijakan yang diambil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, diwajibkan kepada setiap kepala daerah menyajikan informasi keuangannya secara jujur dan terbuka kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan internal control atau pengendalian intern yang baik untuk menunjukkan terwujudnya akuntabilitas yang baik. Internal control dapat mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memihak kepada kepentingan publik.

Menurut Mahmudi (2011: 251) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tepat di masing-masing SKPD. Penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun berbeda dengan Nugraha (2011).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami.

Adanya perbedaan hasil penelitian antara Mustafa (2012) dan Sande (2013) dengan hasil penelitian Primayani dkk (2014) dan Riyansa et al. (2015) tentang penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang uraikan tersebut menunjukkan bahwa kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum berhasil meningkatkan

pengendalian intenal, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, penataan kelembagaan perangkat daerah, peningkatan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, ketersediaan dokumen perencanaan di semua SKPD, meningkatnya kemitraan eksekutif dan legislatif, serta mencegah praktek KKN.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya, dengan mengambil judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, dengan dilakukannya

penelitian ini maka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh baik dalam hal peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya melalui implementasi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan pemahaman mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis oleh calon peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pancawati, et.al. (2019)	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang	Variabel Dependen : Penyajian, <i>Value for money</i> Pengendalian internal Aksesibilitas Variabel Independen : Akuntabilitas	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa baik secara simultan dan parsial variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, <i>value for money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
2.	Embun Widya Sari (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan	Variabel Dependen : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan	Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu,

		<p>Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Keuangan Daerah Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan</p>	<p>Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu, Aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu, Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Inhu dan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan gaya kepemimpinan sebesar 41,80%, sementara sebesar 54,20% dipengaruhi oleh variabel lain.</p>
--	--	--	---	--

3.	Nur Rahma Arumanti (2018)	Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control sebagai Variabel Moderating (studi pada Pemerintah Kabupaten Gowa)	Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Variabel moderating : Internal Control	Akseibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa, internal control memoderasi pengaruh akseibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa dan internal control memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa
4.	Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris	Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan	Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung, Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung

		pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)	Sistem Pengendalian Intern	dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung
5.	Alifia Ulfa Rosalia (2020)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019)	Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat, Penyajian Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di

				Kabupaten Bandung Barat
6.	Dian Saripujiana dan Ida Suriana (2018)	pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel pemoderasi	Variabel Dependen : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Moderating : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	aksesibilitas laporan keuangan daerah bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota Balikpapan
7.	Mawaddah, Murhaban dan Dewi Keumala Sari (2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penerapan Sistem	Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Penyajian Laporan	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh

		Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi pada SKPD Kota Lhokseumawe)	Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe, Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe dan Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe
8.	Mirza Masyhur (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian	Variabel Dependen : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel	penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan

		Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai	Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal	pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9.	Nabila Ayu Indria (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Variabel Dependen : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan
10.	Nurul Hidayah Hasibuan	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,	Variabel Dependen : Akuntabilitas	secara simultan variabel sistem pengendalian

	(2018)	<p>Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan</p>	<p>internal, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi, secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangantidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi, variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi.</p>
--	--------	---	--	--

2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Bastian (2012:297) laporan keuangan sektor publik merupakan epresentasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual membahas laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No 71 Tahun 2010).”

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya dan menyediakan lapotan keuangan terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan dimaksud disampaikan kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah (kepala badan pengelola keuangan daerah) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Pejabat pengelola keuangan daerah menyusun lapotan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan keuangan pendukung yang terdiri dari Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
5. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin (4). Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan maka

rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada poin (5) diajukan ke DPRD.

Mardiasmo (2016:161) secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberi dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat terus menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan pada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of fact and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara dalam.

PP No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Lewier, 2016).

Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Lewier, 2016). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Sande (2013); Mustofa (2012); Wahyuni dkk. (2014); Primayani dkk. (2014); Wahida (2015); Hehanussa (2015); Lewier (2016); Fauziah dan Handayani (2017);

Superdi (2017); dan Mulyani (2017) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan tetapi Riyansa et al. (2015) dan Azizah (2014) menghasilkan penelitian bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja. Tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui dan memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

“Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan stewardship), Mardiasmo (2016:197).

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Yani (2014:122).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas yang efektif tergantung akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses atas laporan kinerja organisasi publik dapat diperoleh melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website internet dan forum yang memberikan perhatian langsung atas peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misal dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya.

Dengan begitu akses masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan akan lebih mudah. Informasi yang dimuat dalam SIKD tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup:

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Penelitian Pancawati (2019), Wahida (2015), Salomi (2015) dan Christy (2016) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan sebuah SKPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu SKPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggung jawaban yang dibuatnya.

2.4 Sistem Pengendalian Intern

Setiap organisasi termasuk pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang ditetapkan. Maka sistem pengendalian intern memiliki kedudukan yang sangat penting.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inti dasar dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bisa mewujudkan suatu praktek-praktek good governance.

Adapun struktur pengendalian intern terdiri atas lima unsur pokok menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kelima unsur pokok tersebut yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan dan tingkat kegiatan
- c. Identifikasi resiko
- d. Analisis resiko
- e. Mengelola resiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari sifat dan tugas serta fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian intern terdiri dari:

- a. Review atas kinerja instansi yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dalam kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan atas informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Penyelesaian audit

Berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Pengaruh pengendalian baik

secara langsung maupun tidak langsung akan tergambar pada laporan keuangan. Jika pengendalian intern suatu organisasi efektif, maka laporan keuangan akan disajikan secara wajar, sebaliknya jika pengendalian intern suatu organisasi tidak efektif, maka laporan keuangan kemungkinan besar mengandung salah saji sangat material. Pengendalian intern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud).

Lima tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipercaya dan integritas informasi
- 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur serta undang-undang yang berlaku
- 3) Pengamanan aktiva
- 4) Ekonomi dan efisiensi kegiatan
- 5) Efektivitas pencapaian tujuan

Penerapan sistem pengendalian intern bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tujuan pengendalian intern juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Hasil penelitian Anesa (2017) Azizah, dkk (2015), Sari dkk (2017) Pramudita (2017) dan Heppy (2017) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eli (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Ada beberapa definisi tentang akuntabilitas di antaranya adalah:

Menurut Mahmudi (2011:18), “akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitasnya atau tanggung jawabnya.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas

dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

- a. Sumber daya financial
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative
- c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability* Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
2. *Process accountability* Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. *Performance accountability* Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. *Program accountability* Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. *Policy accountability* Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintah di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintah demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan menciptakan system pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen

wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

Finner dalam Widodo (2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi.

Terdapat beberapa ciri pemerintah yang *accountable* di antaranya sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
- d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e. Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dengan adanya kontrol dan gaya pemimpin yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintah yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Ludani, dkk 2015).

Wahida (2015); Hehanussa (2015); Lewier (2016); Fauziah dan Handayani (2017); Superdi (2017); dan Mulyani (2017) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Penelitian Pancawati (2019), Wahida (2015), Salomi (2015) dan Christy (2016) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penelitian Anesa (2017) Azizah, dkk (2015), Sari dkk (2017), Pramudita (2017) dan Heppy (2017) menyatakan bahwa

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsep perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian maka kerangka konsep peneliti dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern (sebagai Variabel Independen).

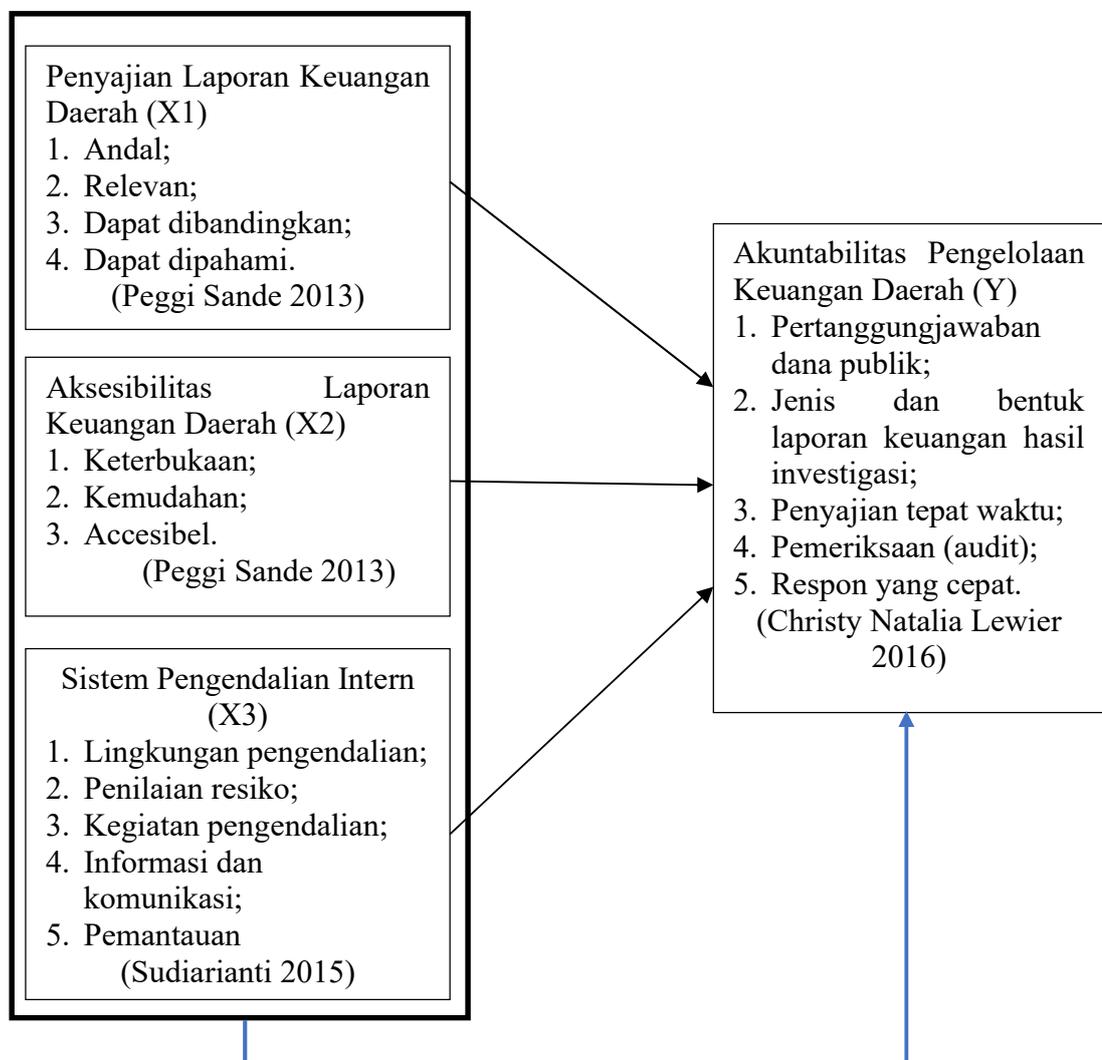
Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Lewier, 2016).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Dengan adanya SPIP maka pemerintah mampu menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan efektif seperti dalam pemeriksaan barang,

fisik kas dan catatan akuntansi serta bisa untuk menindaklanjuti hasil temuan atau review yang diberikan pihak pemeriksa laporan keuangan.

Berdasarkan analogi teoritis dan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terkait dengan analisis determinan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka hubungan variabel penelitian ini digambarkan melalui diagram kerangka konseptual berikut :



Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Diduga penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Diduga penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Diduga variabel aksesibilitas laporan keuangan yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014). Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan lima tingkat jawaban dari yang sangat positif sampai sangat negatif.

1. Variabel Dependen

a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Pasaribu, 2011). Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi laporan keuangan disusun dengan pendekatan akuntansi berbasis akrual dan disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah, pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan bukti, laporan keuangan direview oleh inspektorat sebelum diserahkan ke BPK untuk pemeriksaan dan dilakukannya financial audit, pengelolaan laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi maupun masyarakat, serta pemerintah menyampaikan rancangan APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja.

Indikator dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Christy Natalia Lewier (2016) adalah sebagai berikut ini:

- 1) Pertanggungjawaban dana publik;
- 2) Jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi;
- 3) Penyajian tepat waktu;

- 4) Pemeriksaan (audit);
- 5) Respon yang cepat.

2. Variabel Independen

a. Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Indikator penyajian laporan keuangan meliputi kemampuan penyusunan laporan keuangan secara lengkap, penyelesaian laporan keuangan tepat waktu, laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi dan memprediksi aktivitas baik masa lalu maupun masa depan serta disajikan secara jujur sesuai dengan transaksi, apabila dilakukan pengujian oleh pihak yang berbeda menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan SKPD dapat dijadikan tolak ukur untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Indikator dari penyajian laporan keuangan menurut Peggi Sande (2013) adalah sebagai berikut ini:

- 1) Andal;
- 2) Relevan;
- 3) Dapat dibandingkan;
- 4) Dapat dipahami.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, terbuka dimedia massa dan mudah diakses.

Indikator dari aksesibilitas laporan keuangan menurut Peggy Sande (2013) adalah sebagai berikut ini:

- 1) Keterbukaan;
- 2) Kemudahan;
- 3) Accesibel.

c. Sistem Pengendalian Intern (X3)

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan

Indikator dari sistem pengendalian intern menurut Sudiarianti (2015) adalah sebagai berikut ini:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian resiko;
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal (causal), desain kausal bermanfaat untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, juga bermanfaat pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian survei yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

Sugiyono (2014:81) menyimpulkan bahwa penelitian survei merupakan sebuah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku maupun hubungan variabel, selain daripada itu penelitian survei bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis mengenai variabel sosiologis dan psikologis dari sampel atas populasi tertentu, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan baik wawancara ataupun kuesioner tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung digeneralisasikan.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber asli dalam bentuk kuesioner. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan

menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada sasaran penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian di mulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021.

4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tersebar pada 36 SKPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 orang.

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014, hlm. 92) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan

demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala *Likert*. Sugiyono (2014, hlm. 134) menyatakan bahwa “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer, yaitu dengan memberikan kuesioner/daftar pertanyaan kepada pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan hasil modifikasi atas kuesioner Peggi Sande (2013), Sudiarianti (2015) dan Christy Natalia Lewier (2016). Kuesioner akan diberikan langsung kepada 72 responden dimana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mewakili variabel-variabel dalam penelitian ini, dan dalam hal ini terdapat pilihan atas pertanyaan yang mewakili skala pengukuran tertentu.

4.6 Skala dan Pengukuran Data

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap obyek. Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut: (1)

mempunyai banyak kemudahan; (2) mempunyai realibilitas yang tinggi dalam mengurutkan subyek berdasarkan persepsi; (3) fleksibel dibanding teknik yang lain; (4) aplikatif pada berbagai situasi. Pengolahan data, skala Likert termasuk dalam skala interval. Penentuan skala Likert dalam penelitian ini dari skala 1 sampai dengan 5. Pedoman untuk pengukuran semua variabel adalah dengan menggunakan 5 poin likert scale. kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju (skor 5); Baik/Setuju (skor 4); Cukup baik/ Kurang Setuju (skor 3); Tidak Baik/Tidak Setuju (skor 2); Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (skor 1).

4.7 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu metode dengan cara menganalisa data yang diperoleh untuk mencari ada tidaknya pengaruh Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan dua macam teknik statistik, yaitu teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Statistik deskriptif dipergunakan untuk mendeskripsikan karakteristik skor responden penelitian untuk masing-masing variabel, dengan menggunakan rata-rata, standar deviasi, skor maksimum, skor minimum, dan tabel frekuensi. Statistik inferensial dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang belum terjawab melalui statistik deskriptif. Untuk keperluan tersebut dipergunakan analisis regresi linier ganda.

4.7.1 Uji Prasyarat Analisis

Uji Prasyarat Analisis Sebelum data diolah dan dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji persyaratan asumsi klasik, statistik terlebih dahulu. Adapun uji asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak pada penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk menguji data variabel penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), pengendalian intern (X3) dan akuntabilitas pengelola keuangan (Y). Uji normalitas yang digunakan adalah analisis *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar Variabel (Arum Janie, 2012). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolineritas antar variabel bebas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) dengan melihat nilai toleransinya. Tidak terjadi multikolineritas, jika nilai toleransinya lebih besar 0,10. (2) dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Tidak terjadi multikolineritas jika nilai VIF lebih kecil 10,00.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Arum Janie (2012), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan variance dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada dua cara pendeteksian ada tidaknya heterokedastisitas yaitu metode grafik dan metode statistik. Pengujian pada penelitian ini menggunakan metode grafik. Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas bahwa pada grafik *scatterplot* titik-titik tidak menyebar secara acak baik atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah:

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

a = konstanta

- X_1 = Penyajian laporan keuangan
 X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan
 X_3 = Pengendalian intern
 b_1, b_2, b_3 = Koefisien pengaruh
 e = Kesalahan Prediksi

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan pengendalian intern (X_3) terhadap variabel terkait yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) secara bersama-sama (simultan), maka dilakukan uji F.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan pengendalian intern (X_3) terhadap variabel terkait yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) secara parsial, maka dilakukan uji t.

a) Pengujian hipotesis pertama, kedua

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model regresi berganda.

- a. H_0 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_a berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan dengan degree of freedom ($n - k - 1$) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel

independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2011)

b) Pengujian hipotesis ketiga

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:

- a. H_0 : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_a : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dan dengan *degree of freedom* (k) dan $(n-k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Dimana:

R^2 = R Square

N = Banyaknya Data

K = Banyaknya variabel independent

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan α sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2011)

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. F < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_i diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b) Jika F hitung $<$ atau $\text{Sig.}F >$ 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi. Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten memiliki jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS pada tahun 2010 berjumlah 1.158.336 jiwa. Wilayah Povinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran Nasional dan Internasional memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi kedepan. Salah satu pelabuhan antar pulau yang aktif melayani/ menghubungkan pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Fery Simboro Mamuju, Pelabuhan Rakyat Palipi Majene, Pelabuhan Rakyat Mamuju, Pelabuhan Samudra Belang-belang Bakengkeng Mamuju yang telah mulai dikembangkan dan beroperasi untuk kapal penumpang maupun barang seperti

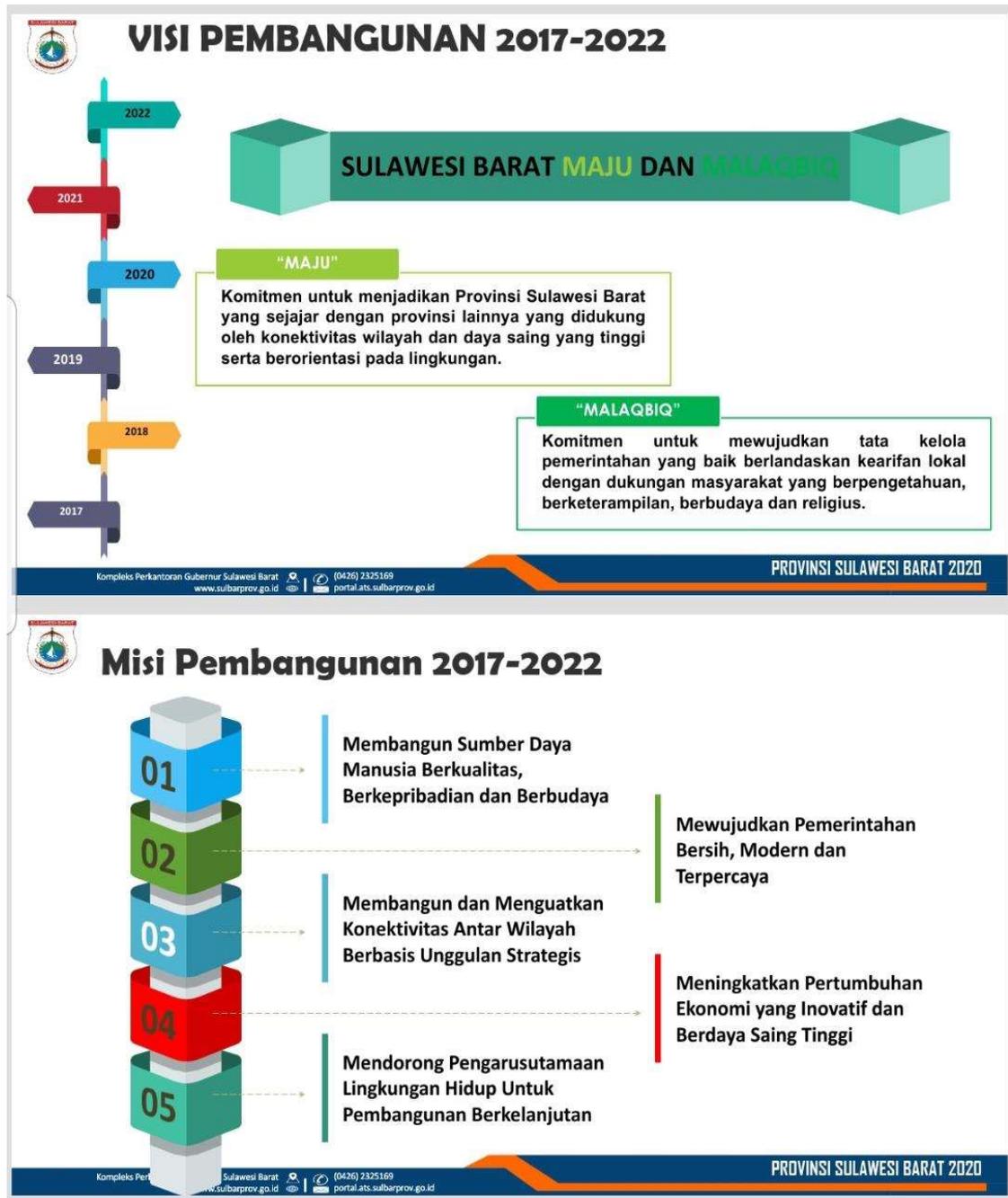
pengangkutan minyak CPO dan mangan, serta sejumlah Pelabuhan lain yang dikelola oleh perusahaan swasta nasional di Kabupaten Mamuju Utara.

Disamping itu Bandar Udara Tampa padang berjarak 27 km dari Kota Mamuju, sementara ini mempunyai landasan pacu 2.500 m x 80 m, kondisi ini menggambarkan bahwa bandara tersebut sudah dapat didarati pesawat komersil ukuran Boeing 737 200 yang berpenumpang hingga 150 orang. Untuk sementara ini, bandara Tampa Padang yang merupakan jembatan udara menghubungkan Makassar – Mamuju dan Mamuju – Balikpapan.

Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari laut dalam, daratan rendah, dataran tinggi dan pegunungan dengan tingkat kesuburan yang tinggi, disamping itu letaknya yang sangat strategis pada posisi silang segitiga emas Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah lewat pantai barat dengan jarak 445 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, 447 Km dari Palu Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar/ Kalimantan Timur, memberikan potensi perencanaan pembangunan yang harus ditata dengan baik. Sehingga kekayaan yang terkandung di dalam alam Sulawesi Barat dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini dipimpin oleh Gubernur H. Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Hj. Enny Angreani Anwar dan Sekretaris Daerah Dr. Muhammad Idris, M.Si, dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

Gambar 5.1 Visi Misi Pembangunan 2017 - 2022



5.1.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada

responden yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Bendahara yang terpilih menjadi sampel melalui proses sampel yang telah dijelaskan pada bab metode penelitian.

Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada para pegawai yang menjadi sampel penelitian. Responden menetapkan janji untuk pengambilan kuesioner selama 1 minggu terhitung sejak kuesioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Dari pengembalian kuesioner yang disebar, 72 (100%) kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti.

Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner

NO	Nama SKPD Lingkup Pemprov. Sulbar	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	Jumlah Kuesioner yang dikembalikan
1	Sekretariat Daerah	2	2
2	Sekretariat DPRD	2	2
3	Inspektorat	2	2
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2
5	Dinas Kesehatan	2	2
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2	2
8	Dinas Sosial	2	2
9	Dinas Tenaga Kerja	2	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	2
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2
14	Dinas Perhubungan	2	2

15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2	2
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2
20	Dinas Pariwisata	2	2
21	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	2	2
22	Dinas Perkebunan	2	2
23	Dinas Kehutanan	2	2
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2	2
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	2	2
26	Dinas Transmigrasi	2	2
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	2
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2
29	Badan Penanggulangan Bencana	2	2
30	Badan Perencanaan Pembangunan	2	2
31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	2	2
32	Badan Kepegawaian Daerah	2	2
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2
35	Badan Penghubung	2	2
36	Rumah Sakit Umum Daerah	2	2
Total		72	72

Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.3 Deskripsi Responden

Kuesioner yang disebarakan 72 eksemplar, semua kuesioner memenuhi kriteria. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja. Dalam kuesioner responden

boleh tidak mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jenis kelamin responden pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki-Laki	44	61,1	61,1	61,1
	Perempuan	28	38,9	38,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan dari jenis kelamin, responden dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan ditemukan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang dengan tingkat persentase 61,1% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase 38,9%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terdapat empat klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokan tingkat pendidikan responden, hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari mereka berlatar belakang berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 37 orang dengan tingkat persentase mencapai 51,4%. Kelompok lain yang memiliki jumlah banyak adalah responden berlatar belakang pendidikan Magister (S2) dengan jumlah 29 orang dengan tingkat persentase mencapai 40,3%, kemudian berpendidikan SMA/SMK dengan jumlah 4 orang dengan tingkat persentase

mencapai sebanyak 5,6%, dan yang berpendidikan diploma dengan jumlah 2 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 2,8% Perincian sebaran tingkat pendidikan diperlihatkan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Magister (Strata2)	29	40,3	40,3	40,3
	Sarjana (Strata1)	37	51,4	51,4	91,7
	Diploma (D3)	2	2,8	2,8	94,4
	SMA/SMK	4	5,6	5,6	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Pengelompokan responden berdasarkan masa kerja memberikan hasil sebagai berikut: responden yang paling banyak adalah mereka yang masa kerja 11-15 tahun yaitu sebanyak 32 orang dengan tingkat persentase 44,4%, diikuti yang masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 23 orang dengan tingkat persentase 31,9%, kemudian yang masa kerja 5-10 tahun sebanyak 13 orang dengan tingkat persentase 18,1% dan responden yang paling sedikit adalah yang masa kerja 16-20 Tahun sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 5,6%. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa Kerja			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	5 – 10 Tahun	13	18,1	18,1	18,1
	11 – 15 Tahun	32	44,4	44,4	62,5
	16 – 20 Tahun	4	5,6	5,6	68,1
	> 20 Tahun	23	31,9	31,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian untuk menunjukkan tanggapan responden mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut dijelaskan tanggapan responden dari variabel dependen dan independen.

1. Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Indikator dari penyajian laporan keuangan adalah andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Item		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X1.1	F	1	42	23	2	4	72
	%	1,4	58,3	31,9	2,8	5,6	100
X1.2	F	1	45	20	4	2	72
	%	1,4	62,5	27,8	5,6	2,8	100
X1.3	F	3	42	22	2	3	72
	%	4,2	58,3	30,6	2,8	4,2	100
X1.4	F	3	44	19	4	2	72
	%	4,2	61,1	26,4	5,6	2,8	100
X1.5	F	1	9	13	44	5	72
	%	1,4	12,5	18,1	61,1	6,9	100
X1.6	F		11	15	42	4	72
	%		15,3	20,8	58,3	5,6	100
X1.7	F	11	30	1	27	3	72
	%	15,3	41,7	1,4	37,5	4,2	100
X1.8	F	3	44	19	4	2	72
	%	4,2	61,1	26,4	5,6	2,8	100
X1.9	F	1	9	13	44	5	72
	%	1,4	12,5	18,1	61,1	6,9	100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan)”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang atau 58,3% dari total

responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

- b. Pertanyaan kedua “SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 45 orang atau 62,5% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang atau 58,3% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 44 orang atau 61,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya

disajikan dalam laporan keuangan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 44 orang atau 61,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

- f. Pertanyaan keenam “Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 42 orang atau 58,3% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,6% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 30 orang atau 41,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 44 orang atau 61,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

- i. Pertanyaan kesembilan “Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 44 orang atau 61,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila penyajian laporan keuangan diukur dengan indikator: andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Indikator dari aksesibilitas laporan keuangan adalah keterbukaan, kemudahan dan aksesibel.

Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan

Item		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X2.1	F	3	31	22	11	5	72
	%	4,2	43,1	30,6	15,3	6,9	100
X2.2	F	3	19	22	15	13	72
	%	4,2	26,4	30,6	20,8	18,1	100
X2.3	F	3	23	22	14	10	72
	%	4,2	31,9	30,6	19,4	13,9	100
X2.4	F	2	37	24	9		72
	%	2,8	51,4	33,3	12,5		100
X2.5	F	2	32	25	9	4	72
	%	2,8	44,4	34,7	12,5	5,6	100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- b. Pertanyaan kedua “Para pengguna laporan keuangan daerah dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori kurang setuju sebanyak 22 orang atau 30,6% dari total responden dan

penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.

- c. Pertanyaan ketiga “Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 23 orang atau 31,9% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihakpihak yang berkepentingan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 37 orang atau 51,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Laporan keuangan daerah dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila aksesibilitas laporan keuangan diukur dengan indikator: keterbukaan, kemudahan dan aksesibel.

3. Pengendalian Intern (X3)

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator dari pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap Pengendalian Intern

Item		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X3.1	F		30	2	29	11	72
	%		41,7	2,8	40,3	15,3	100
X3.2	F		22	3	35	12	72
	%		30,6	4,2	48,6	16,7	100
X3.3	F		31	2	30	9	72
	%		43,1	2,8	41,7	12,5	100
X3.4	F		32	1	31	8	72
	%		44,4	1,4	43,1	11,1	100
X3.5	F	1	31	3	30	7	72
	%	1,4	43,1	4,2	41,7	9,7	100
X3.6	F		31	1	30	10	72
	%		43,1	1,4	41,7	13,9	100
X3.7	F		23	2	35	12	72
	%		31,9	2,8	48,6	16,7	100
X3.8	F		31	2	30	9	72
	%		43,1	2,8	41,7	12,5	100
X3.9	F		24	4	41	3	72
	%		33,3	5,6	56,9	4,2	100
X3.10	F		30	3	29	10	72
	%		41,7	4,2	40,3	13,9	100
X3.11	F		24	1	35	12	72
	%		33,3	1,4	48,6	16,7	100
X3.12	F		27	6	25	14	72
	%		37,5	8,3	34,7	19,4	100
X3.13	F		23	2	35	12	72
	%		31,9	2,8	48,6	16,7	100
X3.14	F		22	3	35	12	72
	%		30,6	4,2	48,6	16,7	100

X3.15	F		31	1	30	10	72
	%		43,1	1,4	41,7	13,9	100
X3.16	F		24	1	35	12	72
	%		33,3	1,4	48,6	16,7	100
X3.17	F		32	1	30	9	72
	%		44,4	1,4	41,7	12,5	100
X3.18	F		32	1	30	9	72
	%		44,4	1,4	41,7	12,5	100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Pimpinan SKPD selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 30 orang atau 41,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- b. Pertanyaan kedua “SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Struktur organisasi SKPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit

dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

- d. Pertanyaan keempat “Pimpinan SKPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- f. Pertanyaan keenam “SKPD telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “SKPD selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori

tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

- h. Pertanyaan kedelapan “Semua transaksi yang di entri dan di proses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- i. Pertanyaan kesembilan “Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 41 orang atau 56,9% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- j. Pertanyaan kesepuluh “Pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 30 orang atau 41,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- k. Pertanyaan kesebelas “Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan”. Ditanggapi

responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

- l. Pertanyaan kedua belas “Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 27 orang atau 37,5% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 6 orang atau 8,3% dari total responden.
- m. Pertanyaan ketiga belas “Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- n. Pertanyaan keempat belas “Informasi di SKPD telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.

- o. Pertanyaan kelima belas “Saluran komunikasi dalam organisasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 31 orang atau 43,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- p. Pertanyaan keenam belas “Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 35 orang atau 48,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- q. Pertanyaan ketujuh belas “SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review dan saran yang diberikan oleh BPK atau Inspektorat”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4 % dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- r. Pertanyaan kedelapan belas “Pimpinan SKPD selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4 % dari total responden dan

penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila pengendalian intern diukur dengan indikator: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Indikator dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi, penyajian tepat waktu, pemeriksaan (audit) dan respon yang cepat.

Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Item		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
Y.1	F	3	32	14	11	12	72
	%	4,2	44,4	19,4	15,3	16,7	100
Y.2	F		17	8	38	9	72
	%		23,6	11,1	52,8	12,5	100
Y.3	F	4	25	23	18	2	72
	%	5,6	34,7	31,9	25	2,8	100
Y.4	F	4	25	23	18	2	72
	%	5,6	34,7	31,9	25	2,8	100
Y.5	F	3	32	14	11	12	72
	%	4,2	44,4	19,4	15,3	16,7	100
Y.6	F		17	8	38	9	72
	%		23,6	11,1	52,8	12,5	100
Y.7	F	3	25	25	16	3	72
	%	4,2	34,7	34,7	22,2	4,2	100
Y.8	F	4	25	23	18	2	72
	%	5,6	34,7	31,9	25	2,8	100
Y.9	F	1	25	23	20	3	72
	%	1,4	34,7	31,9	27,8	4,2	100
Y.10	F		16	25	23	8	72
	%		22,2	34,7	31,9	11,1	100
Y.11	F	1	25	23	20	3	72
	%	1,4	34,7	31,9	27,8	4,2	100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 72 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Laporan keuangan daerah disusun oleh SKPD dengan pendekatan akuntansi berbasis akrual”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- b. Pertanyaan kedua “Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 38 orang atau 52,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 8 orang atau 11,1% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Laporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Tersedianya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh SKPD”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan

kategori sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

- e. Pertanyaan kelima “Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 44,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- f. Pertanyaan keenam “Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 38 orang atau 52,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 8 orang atau 11,1% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju dan kurang setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,2% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Pengelolaan laporan keuangan daerah dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden

dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,8% dari total responden.

- i. Pertanyaan kesembilan “APBD disusun dengan pendekatan kinerja”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.
- j. Pertanyaan kesepuluh “Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori kurang setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 8 orang atau 11,1% dari total responden.
- k. Pertanyaan kesebelas “Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 25 orang atau 34,7% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan

pernyataan setuju apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator: pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi, penyajian tepat waktu, pemeriksaan (audit) dan respon yang cepat.

5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi yang membacanya. Pengukuran analisis deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 5.9 Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan	72	12	40	28,26	5,222
Aksesibilitas Laporan Keuangan	72	7	22	15,64	3,655
Pengendalian Intern	72	24	72	47,96	16,521
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	72	10	36	23,58	6,178
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data primer diolah 2021

- a. Variabel penyajian laporan keuangan (X1) memiliki jumlah sample sebanyak 72 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 12, dengan nilai tertinggi

(maksimum) sebesar 40, nilai rata-rata (mean) sebesar 28,26 dan standar deviasi sebesar 5,222.

- b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) memiliki jumlah sample sebanyak 72 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 7, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 22, nilai rata-rata (mean) sebesar 15,64 dan standar deviasi sebesar 3,655.
- c. Variabel pengendalian intern (X3) memiliki jumlah sample sebanyak 72 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 24, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 72, nilai rata-rata (mean) sebesar 47,96 dan standar deviasi sebesar 16,521.
- d. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) memiliki jumlah sample sebanyak 72 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 10, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 36, nilai rata-rata (mean) sebesar 23,58 dan standar deviasi sebesar 6,178.

5.1.6 Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen dalam penelitian yang menggunakan kuesioner diperlukan untuk menentukan apakah alat pengukuran dapat digunakan atau tidak dalam proses pengumpulan data. Dalam pengujian ini dilakukan proses validitas dan reliabilitas jawaban kuesioner. Dengan dilakukan proses pengujian ini diharapkan hasil hipotesis dengan yang diharapkan.

a. Uji validitas

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0.05$ (Santoso,

2015). Uji validitas dengan metode ini dilakukan mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi harus signifikan berdasarkan ukuran statistik. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain instrumen tersebut valid. Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut valid jika nilai $r \geq 0,2319$ (r_{tabel}). Adapun hasil uji validitas dari setiap item penelitian variabel dalam penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah, disajikan dalam Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X1.1	0,699	0,2319	Valid
X1.2	0,748	0,2319	Valid
X1.3	0,751	0,2319	Valid
X1.4	0,799	0,2319	Valid
X1.5	0,636	0,2319	Valid
X1.6	0,569	0,2319	Valid
X1.7	0,555	0,2319	Valid
X1.8	0,799	0,2319	Valid
X1.9	0,636	0,2319	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.10 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila

dibandingkan dengan r_{tabel} yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2319. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel penyajian laporan keuangan (X_1) berada diantara 0,555 – 0,799. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2319 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner penyajian laporan keuangan (X_1) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel aksesibilitas laporan keuangan, disajikan dalam Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X2.1	0,730	0,2319	Valid
X2.2	0,839	0,2319	Valid
X2.3	0,797	0,2319	Valid
X2.4	0,610	0,2319	Valid
X2.5	0,666	0,2319	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.11 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r_{tabel} yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2319. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) berada diantara 0,610 – 0,839. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2319 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner aksesibilitas laporan keuangan (X_2) adalah valid atau mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Variabel Pengendalian Intern (X3)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel pengendalian intern, disajikan dalam Tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X3)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X1.1	0,744	0,2319	Valid
X1.2	0,918	0,2319	Valid
X1.3	0,809	0,2319	Valid
X1.4	0,765	0,2319	Valid
X1.5	0,658	0,2319	Valid
X1.6	0,728	0,2319	Valid
X1.7	0,916	0,2319	Valid
X1.8	0,823	0,2319	Valid
X1.9	0,809	0,2319	Valid
X1.10	0,747	0,2319	Valid
X1.11	0,922	0,2319	Valid
X1.12	0,793	0,2319	Valid
X1.13	0,915	0,2319	Valid
X1.14	0,918	0,2319	Valid
X1.15	0,743	0,2319	Valid
X1.16	0,921	0,2319	Valid
X1.17	0,742	0,2319	Valid
X1.18	0,756	0,2319	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.12 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila

dibandingkan dengan rtabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2319. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel pengendalian intern (X_3) berada diantara 0,658 – 0,922. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2319 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner pengendalian intern (X_3) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disajikan dalam Tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
Y.1	0,610	0,2319	Valid
Y.2	0,815	0,2319	Valid
Y.3	0,824	0,2319	Valid
Y.4	0,824	0,2319	Valid
Y.5	0,610	0,2319	Valid
Y.6	0,815	0,2319	Valid
Y.7	0,759	0,2319	Valid
Y.8	0,824	0,2319	Valid
Y.9	0,739	0,2319	Valid
Y.10	0,613	0,2319	Valid
Y.11	0,739	0,2319	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.12 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila

dibandingkan dengan *r* tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2319. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) berada diantara 0,610 – 0,824. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *r* hitung > 0,2319 (*r* tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukur. Kehandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS. Nilai batas (*cut of point*) yang diterima untuk tingkat *alpha cronbach* adalah ≥ 0.60 , walaupun ini bukan merupakan standar absolut (Sekaran, 2011). Instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah ≥ 0.60 . Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut of Point</i>	Status
Penyajian Laporan Keuangan (X ₁)	0,847	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	0,784	0,60	Reliabel
Pengendalian Intern (X ₃)	0,969	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,922	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari Tabel 5.14 pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah $\geq 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas ini diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) untuk variabel penyajian laporan keuangan (X₁) sebesar 0,847; variabel aksesibilitas laporan keuangan (X₂) sebesar 0,784; variabel pengendalian intern (X₃) sebesar 0,969 dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,922. Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel berada diatas ambang batas (*cut of point*) 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

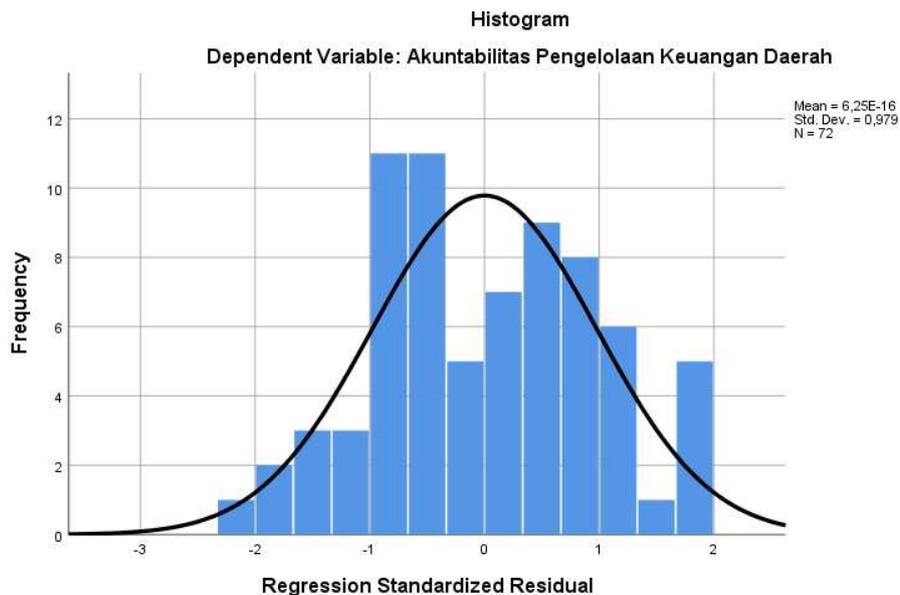
5.1.7 Uji Prasyarat Analisis

Sebelum data diolah dan dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji persyaratan asumsi klasik statistik terlebih dahulu. Adapun uji asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

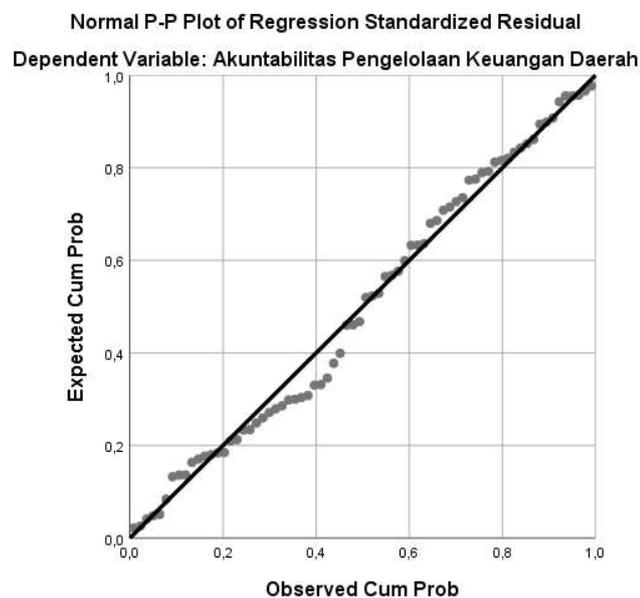
Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *probability plot*. Jika persebaran data pada grafik *probability plot* searah dengan garis diagonal maka data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal, atau jika grafik histogramnya menunjukkan dan mengikuti pola distribusi yang normal, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Hal itu dapat dilihat dari gambar 5.2 dimana persebaran data searah dengan garis diagonal, dan pada gambar 5.3 dapat dilihat bahwa grafik histogram mengikuti pola distribusi yang normal.

Gambar 5.2 Grafik Histogram



Sumber: Data primer diolah 2021

Gambar 5.3 Normal Probability Plot



Sumber: Data primer diolah 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat garis histogram mengikuti pola distribusi yang normal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. Selain memperhatikan persebaran titik-titik pada probability plot dan grafik histogram, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Tabel 5.15 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardize d Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,05764252
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,056
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah 2021

Setelah dilakukan pengujian statistic Kolmmogrov-Smirnov sebagaimana dapat dilihat dari tabel 5.15, maka didapat nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, artinya dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau tidak antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mengalami korelasi antar variabel (bebas dari multikolinieritas). Multikolinieritas ini dapat dilihat dari VIF (Varians Inflation Factor). Jika VIF ≤ 10 maka tingkat multikolinieritas dapat ditoleransi. Apabila besarnya nilai VIF ≤ 10 dan nilai TOL (Tolerance) $\geq 0,10$ maka penelitian tersebut menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 5.16 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	,152	2,727		,056	,956		
Penyajian Laporan Keuangan	,302	,139	,256	2,183	,032	,463	2,161
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,738	,195	,437	3,782	,000	,475	2,103
Pengendalian Intern	,070	,034	,186	2,021	,047	,749	1,336

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 5.16 dapat menjelaskan bahwa:

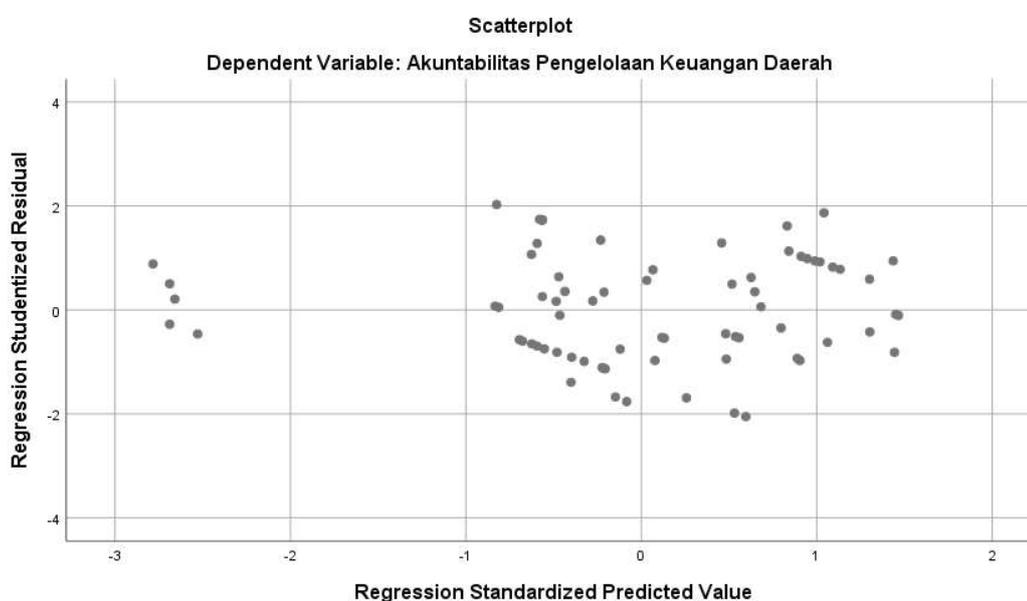
1. Variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai tolerance $0,463 > 0,1$ dan VIF $2,161 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai tolerance $0,475 > 0,1$ dan VIF $2,103 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel pengendalian intern memiliki nilai tolerance $0,749 > 0,1$ dan VIF $1,336 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya. Uji ini dilakukan dengan memerhatikan diagram plot, dan memerhatikan persebaran titik-titik pada diagram tersebut, titik-titik tersebut harus menyebar diatas, dibawah maupun disekitar angka 0, titik-titik tersebut tidak boleh hanya

diasas atau dibawah saja, serta persebaran titik-titik tersebut tidak boleh membentuk pola-pola tertentu seperti mengumpul, menyebar bergelombang, atau membentuk pola-pola tertentu. Setelah dilakukan uji heterokedastisitas maka titik-titik pada diagram plot tersebar dibawah, diatas dan disekitar angka 0, serta tidak membentuk pola-pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa data yang telah terkumpul lolos uji heterokedastisitas hal ini dapat dilihat pada gambar 5.4.

Gambar 5.4 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan arah pengaruh apakah positif atau negatif dengan bantuan program SPSS 25. Analisis ini menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern sedangkan variabel dependen

penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	,152	2,727		,056	,956
Penyajian Laporan Keuangan	,302	,139	,256	2,183	,032
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,738	,195	,437	3,782	,000
Pengendalian Intern	,070	,034	,186	2,021	,047

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data primer diolah 2021

Dari tabel 5.17 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,152 + 0,302X_1 + 0,738X_2 + 0,070X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ = Penyajian Laporan Keuangan

X₂ = Aksesibilitas Laporan Keuangan

X₃ = Pengendalian Intern

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

Berdasarkan hasil pengamatan regresi linier berganda di atas dapat menjelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berupa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen) sebesar 0,152 atau 15,2%.
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan 0,302. Hal ini berarti bahwa jika penyajian laporan keuangan mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap mengalami peningkatan sebesar 0,302 atau sebesar 30,2% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan 0,738. Hal ini berarti bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap mengalami peningkatan sebesar 0,738 atau sebesar 73,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Koefisien regresi variabel pengendalian intern 0,070. Hal ini berarti bahwa jika pengendalian intern mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap mengalami peningkatan sebesar 0,070 atau sebesar 7% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

5.1.9 Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t (Uji Parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung

masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai thitung \geq ttabel, maka variabel bebasnya secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Begitu pun jika tingkat signifikannya, apabila lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Selain itu, uji ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas tersebut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan melihat nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki pengaruh paling dominan atau signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.18 Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,152	2,727		,056	,956
Penyajian Laporan Keuangan	,302	,139	,256	2,183	,032
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,738	,195	,437	3,782	,000
Pengendalian Intern	,070	,034	,186	2,021	,047

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 5.18 dapat menjelaskan bahwa:

1. Pengaruh variabel penyajian laporan keuangan (X1) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan sebesar 2,183 dan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel

dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,183 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0.032 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

2. Pengaruh variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 3,782 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,782 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

3. Pengaruh variabel pengendalian intern (X_3) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengendalian intern sebesar 2,021 dan tingkat signifikansi sebesar 0,047. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh

signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,021 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0.047 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

4. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,256, variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,437 dan variabel pengendalian intern sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 43,7%.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel} berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara bersama-sama variabel bebasnya tidak memiliki pengaruh terhadap variabel

terikatnya. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas atau peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas $< \alpha$ (0,05), maka hipotesis diterima. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.19 Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1540,523	3	513,508	29,871	,000 ^b
	Residual	1168,977	68	17,191		
	Total	2709,500	71			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 29,871 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($29,871 > 2,74$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,754 ^a	,569	,550	4,146

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari tabel 5.20 Nilai R Square sebesar 0,569 atau 56,9%, ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dijelaskan oleh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern adalah sebesar 56,9 % sedangkan sisanya sebesar 0,431 atau 43,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

5.2 Pembahasan

Hasil uji hipotesis yang didapat berdasarkan penelitian dan pengelolaan data melalui SPSS 25, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

5.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan sebesar 2,183 dan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,183 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0.032 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel penyajian laporan keuangan maka akan semakin pula meningkatkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya, jika variabel penyajian laporan keuangan menurun, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga ikut menurun. Berarti jika penyajian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan karakteristik laporan keuangan, maka akan berkaitan terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan efektif ketika transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan disajikan dengan lengkap dan reliabel dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Suatu kejelasan pengelolaan keuangan suatu entitas memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang diberikan akan menjadikan penyajian laporan keuangan lebih efektif. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah dapat dikatakan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Dimana laporan keuangan sudah di sajikan secara lengkap dan jujur mengenai laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian penyajian laporan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap dan SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan. Adapun pernyataan mengenai Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu serta Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini mayoritas responden setuju. Hal tersebut serupa dengan pernyataan mengenai Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya para responden mayoritas juga menyetujuinya. Jika membahas mengenai Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya maka mayoritas responden menyetujuinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifia Ulfa Rosalia (2020), Mawaddah, et.al (2019), Mirza Masyhur (2017), Nabila Ayu Indria (2018), Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020), Nur Rahma Arumanti (2018), Nuria Rahma (2017), Nurul Hidayah Hasibuan (2018), Salomi J. Hehanussa (2015) dan Theresia Yuliana Mansyuer (2020) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dian Saripujiana dan Ida Suriana (2018), Embun Widya Sari (2017), Nur Azizah, et.al (2015) dan Septia Yolanda (2018) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 3,782 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel ($3,782 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi

dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel aksesibilitas laporan keuangan maka akan semakin pula meningkatkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya, jika variabel aksesibilitas laporan keuangan menurun, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga ikut menurun. Aksesibilitas dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang mengasumsikan dimana pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi, dengan memberikan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna laporan keuangan daerah. Kemudahan dalam mengakses laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas keuangan akan berjalan dengan baik. Apabila aksesibilitas dengan indikator terbuka di media massa sebagai indikator yang paling dominan, mudah diakses dan ketersediaan informasi/accibel dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudahan akses laporan keuangan daerah sebagai salah satu alat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak didukung dengan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat seperti melalui website resmi pemerintah harus didukung dengan akses jaringan internet yang kuat dan

penyebarluasan informasi kepada publik harus terus diperbaharui sehingga akuntabilitas publik dapat berjalan efektif. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas akan tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika berbicara mengenai hasil tabulasi jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap pernyataan mengenai laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa. Para responden juga mayoritas setuju terhadap pernyataan masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website). Para responden juga mayoritas mengakui bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Responden juga mayoritas menyetujui bahwa laporan keuangan daerah dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Arumanti (2018), Theresia Yuliana Mansyuer (2020), Mawaddah, et.al (2019), Salomi J. Hehanussa (2015), Septia Yolanda (2018), Alifia Ulfa Rosalia (2020), Nuria Rahma (2017), Dian Saripujiana dan Ida Suriana (2018), Mirza Masyhur (2017) dan Embun Widya Sari (2017) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nabila Ayu Indria (2018), Nurul Hidayah Hasibuan (2018), Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020) dan Nur Azizah, et.al (2015) mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.3 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengendalian intern sebesar 2,021 dan tingkat signifikansi sebesar 0,047. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,994. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,021 > 1,994$) dan nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (H_a diterima dan H_o ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel pengendalian intern maka akan semakin pula meningkatkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pengendalian

intern menurun, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga ikut menurun. berarti dengan semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang mencakup lingkungan pengendalian, Pengaruh Sistem Pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik maka dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini mendukung teori stewardship dimana steward (manajemen dan audit internal) mengarahkan kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk menghasilkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik. Pada dasarnya, usaha untuk meningkatkan dan membangun sistem pengendalian intern merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi maka dari itu penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sistem pengendalian intern serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat cukup dinilai baik dan sudah berjalan efektif. Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan secara integral, diharapkan agar pemerintah mampu mengelola kekayaan daerah dengan sebaik mungkin agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat serta dapat meminimalkan dan memberantas tindak korupsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian

intern pemerintah yang diterapkan secara menyeluruh dan integral akan mampu menciptakan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju pimpinan SKPD selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai dan pimpinan SKPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. Adapun pernyataan mengenai Semua transaksi yang di entri dan di proses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi mayoritas responden setuju. Hal tersebut serupa dengan pernyataan mengenai Saluran komunikasi dalam organisasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan para responden mayoritas juga menyetujuinya. Jika membahas mengenai Pimpinan SKPD selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan serta SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review dan saran yang diberikan oleh BPK atau Inspektorat maka mayoritas responden menyetujuinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah, et.al (2019), Mirza Masyhur (2017), Nurul Hidayah Hasibuan (2018), Embun Widya Sari (2017), Theresia Yuliana Mansyuer (2020), Nur Azizah, e.al (2015), Nuria Rahma (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020), Indriya (2013) dan Melisha

(2018) mengatakan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 29,871 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($29,871 > 2,74$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Barat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzli Mawaddah, et.al (2019) yang dilakukan pada SKPD Kota Lhokseumawe dan penelitian Nurul Hidayah Hasibuan (2018) yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima.**

5.2.5 Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,256, variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,437 dan variabel

pengendalian intern sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 43,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang sangat vital dalam sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin memadai fasilitas akses laporan keuangan yang diberikan kepada para pengguna maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat. Para pengguna akan mampu mengawasi pertanggungjawaban pemakaian aset daerah dan prosedur keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah jika diberikan fasilitas akses secara terbuka.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 3 yang menyatakan variabel aksesibilitas laporan keuangan yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji 3 (tiga) hipotesis dengan menggunakan Multiple Regression dengan alat bantu Statistical Package for the Social Science (SPSS), dimana penelitian dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi.
2. Secara simultan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi.
3. Aksesibilitas laporan keuangan menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan dan pengendalian intern. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen Aksesibilitas laporan keuangan yang baik dan terarah menjadi inti dari akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam satu periode.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, secara terperinci dapat dikemukakan saran-saran, baik untuk pengembangan

pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis. Adapun saran-saran penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah
 - a. Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan belum dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna.
 - b. Informasi tentang laporan keuangan daerah belum dapat diperoleh dengan mudah oleh para pengguna laporan keuangan daerah.
 - c. Untuk kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset belum ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik.
 - d. Pendapatan daerah harusnya disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Meskipun dalam pengendalian persepsi dan pemahaman orang lain tidaklah mudah, sebaiknya peneliti selanjutnya mampu secara umum menjelaskan secara terperinci dan memberikan penekanan dalam batasan dalam memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan.
 - b. Untuk menemukan keakuratan data penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meluaskan objek penelitian, tidak hanya pada satu provinsi dengan rentan waktu yang lebih panjang.

- c. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel independent lainnya selain penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian intern yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependent akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independent lain diluar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- _____, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Abubakar, A. A. (2017). Effect of Internal Control Activity On Financial Accountability And Transparency In Local Government Areas Of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 9(30), 58 – 65.
- Alifia Ulfa Rosalia (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019). *e-Proceeding of Management : Vol.7, No.2 Agustus 2020*. Page 3098.
- Amalya, T. A. (2017). Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability: Study on Village Governance in West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*, Vol. 5, No. 12.
- Amirullah. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, (2012). *Akuntansi sektor publik*. Edisi 4, Jakarta: Erlangga
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2014). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review* Vol. 22 No.1.

- Dian Saripujiana dan Ida Suriana (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. SNITT-Politeknik Negeri Balikpapan 2018. ISBN: 978-602-51450-1-8.
- Erlina, O. R. (2015). Akuntansi keuangan daerah. Edisi 4. Jakarta: salemba empat.
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi, Vol.6, No 6.STISEA Surabaya.
- Fitri, Y. (2018). Analysis Of Factors Affecting The Quality Of Government Financial Statements Of Binjai City With Work Motivation As Moderating Variables. Public Budgeting, Accounting and Finance, ISSN 2655-6693.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gio, P. U. (2015). Belajar Olah Data dengan SPSS, MINITAB, R, MICROSOFT EXCEL, EVIEWS, LISREL, AMOS, dan SMARTPLS. USUPress.
- Grosso, A. L. (2011). How Citizens View Governmen Performance Reporting. Public Performance & Management Review, 35, 235-250.
- HAPSARI, N. (2018). The Influence Of Competence, Accountability, Motivation, And Organizational Commitment On The Performance Of Regional Financial Managers In Skpds (Regional Work Units) Of Binjai Municipal Administration. International Journal of Public Bud, ISSN 2655-6693.
- Hartono, J. (2011). Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal Ekonomi, Vol 2, No 1. Universitas Sultan Agung.
- Ichlas, M. H. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- Indra Gunawan, S. (2018). Nalysis Of Factors Affecting Managerial Performance Skpd In North Sumatera Provincial Government With Internal Control As Moderating Variables. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, ISSN 2655-6693.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press. 2012
- Kurniawati, M. M. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi, Universitas Jember*.
- Lewier, C. N. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi:Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, (2016). *Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta*.
- Mawaddah, et.al (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Volume 5 Nomor 2 Juni 2019.
- Mirza Masyhur (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017.
- Mustafa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Journal Unnes.ac.id*.
- Nabila Ayu Indria (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1438 H/2018 M
- Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2020.

- Nugraha, D. S. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi). *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 3 No.1.
- Nur Azizah, et.al (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal riset dan aplikasi: akuntansi dan manajemen*. doi: 10.18382/jraam.v1i2.18.
- Nur Rahma Arumanti (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa). Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Nurul Hidayah Hasibuan (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nuria Rahma (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 2 (Oktober) 2017.
- Nurmuthmainnah, W. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Makassar:, akultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pancawati, et.al. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang. *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah* 2(1):21 DOI:10.21043/aktsar.v2i1.4963.
- Pasaribu, F. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis, Medan. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Primayani, P. R. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal Value For Money Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). E-Jurnal S1 Ak Vol.2, No.1., Universitas Pendidikan Ganesha.

Purbasari, H. d. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ramon, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.

Ridho Riyansa, et.al (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). Vol. 7 No. 1 (2015): Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Wisuda ke 64 Agustus 2015.

Sande, Peggy. (2013). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat)." Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatra Utara. Hlm. 1-20

Sanjaya, D. N. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Buleleng). e-Journal Vol 2 No 1 S1.Ak., Universitas Pendidik (Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1).

Santoso, S. (2015). SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis., Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. urnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.

Sari, N. G. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia Stae

Universities. *international Journal of Civil Engineering and technology*, 8(9) 2017, pp. 157-166.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Septia Yolanda (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM FEB*, Volume 1 Edisi 1 (Januari – Juni 2018).

Somad, a. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.

Stecolini, I. (2012). *Local government annual Report: an Accountability Medium?*. Paper Dipresentasikan Pada EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Performs, Durbin.

Subekti, I. A. (2015). “Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan. *JSAI*, Vol. 2 No. 1 Juni 2015. Hlm. 72-84.

Sudiarianti, Ni Made, Herawati, Nyoman Trisna, Sinarwati, Nikadek, (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 18*. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.

Sugiyono, A. (2013). *Metode Penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau*.

Theresia Yuliana Mansyuer (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585.

- Veronica, J. S. (2018). Analysis Of Factors Affecting Weaknesses Of Internal Control System At District And City Governments In North Sumatra Province. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, ISSN 2655-6693.
- Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyuni, P. S. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *E-Journal S1 Ak, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Widodo, Joko. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yusrianti, H. S. (2013). The Effect of Regional Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statements on the Accountability of Regional Financial Management in Palembang City. Paper is presented in scientific forum The 14thFour A Annual Conference, Penang, Malaysia.
- Zahro, F. H. (2018). Factors Affecting The Quality Of The Performance Accountability Report Of Government Agency With Organizational Commitments As A Moderating Variable Within Technical Implementation Units Of Directorate General Of Early Childhood Ed. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, ISSN 2655-6693.

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN



PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA

Status Terakreditasi "B" Oleh BAN-PT

Nomor : 1321/PPS/STIE-NI/VII/2021 Makassar, 24 Juli 2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Tesis

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sulawesi Barat

Di-
Mamuju

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana **STIE Nobel Indonesia** Makassar tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Nurhayati**
NIM : 2019MM12269
Program Studi : Magister Manajemen (S2)
Judul Tesis : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Komisi Pembimbing : 1. Dr. Maryadi, S.E., M.M.
2. Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., CA.

Waktu Penelitian : Selama bulan Juli – Agustus 2021

Untuk keperluan tersebut di atas, Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi izin penelitian pada Mahasiswa Kami tersebut untuk mengadakan Penelitian di Instansi terkait.

Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana
STIE Nobel Indonesia Makassar

Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar;
2. Ketua PRODI MM PPS-STIE Nobel Indonesia Makassar;
3. Mahasiswa Ybs.;
4. Pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426 2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00193/76.RP.PTSP.B/VIII/2021**

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Nomor : 1321/PPS/STIE-NI/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **NURHAYATI**
b. NIM : 2019MM12269
c. Alamat : Jl. Husni Thamrin Kel. Rimuku Kec. Mamuju
d. No.HP : 085397224767
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
" PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT "
- 2). Lokasi Penelitian : BPKPD Provinsi Sulawesi Barat
- 3). Waktu/Lama Penelitian : **23 Juli s/d 23 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal 02 Agustus 2021

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Ketua PRODI MM PPS-STIE Nobel Indonesia Makassar di Makassar;
7. Pertinggal;

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

1. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)

2. Bendahara Pengeluaran

Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

di_ Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhayati

Nim : 2019MM12269

Alamat : Mamuju

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/I sekalian untuk menjadi Responden dan mengisi kuesioner ini sebagai data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Peneliti,

NURHAYATI
2019MM12269

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kuesioner ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dan tidak ada unsur yang menyesatkan dalam penggunaannya. Isilah form yang disediakan dengan jujur.

Identitas Diri

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Nama SKPD :
5. Jabatan : PPK Bendahara
6. Pangkat/Golongan :
7. Pendidikan Terakhir : SMA/SMK Diploma S1
 S2 S3
8. Lama Bekerja : Tahun

Terima kasih Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (√).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 sampai dengan 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan-pertanyaan.

Skor jawaban adalah sebagai berikut:

Keterangan	(SS) Sangat Setuju	(S) Setuju	(KS) Kurang Setuju	(TS) Tidak Setuju	(STS) Sangat Tidak Setuju
Skor	5	4	3	2	1

1. Penyajian Laporan Keuangan (X1)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)
1	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan).					
2	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.					
3	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.					
4	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					

6	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
8	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
9	Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna					

Sumber : Peggi Sande (2013)

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Para pengguna laporan keuangan daerah dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)					
4	Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan					
5	Laporan keuangan daerah dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah					

Sumber : Peggi Sande (2013)

3. Pengendalian Intern (X3)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)
Lingkungan Pengendalian						
1	Pimpinan SKPD selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai					
2	SKPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					
3	Struktur organisasi SKPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai					
4	Pimpinan SKPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku					
5	Pimpinan SKPD selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang					
Penilaian Risiko						
6	SKPD telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya					
7	SKPD selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi					
Aktivitas Pengendalian						
8	Semua transaksi yang di entri dan di proses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.					
9	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik					
10	Pengeluaran uang pada SKPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak.					
11	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					
12	Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur.					
Informasi dan Komunikasi						

13	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya					
14	Informasi di SKPD telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
15	Saluran komunikasi dalam organisasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.					
Pemantauan						
16	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern.					
17	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review dan saran yang diberikan oleh BPK atau Inspektorat.					
18	Pimpinan SKPD selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					

Sumber : Sudiarianti (2015)

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

No	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Laporan keuangan daerah disusun oleh SKPD dengan pendekatan akuntansi berbasis akrual					
2	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan					
3	Laporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah					
4	Tersedianya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh					

	SKPD					
5	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
6	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
7	Dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah					
8	Pengelolaan laporan keuangan daerah dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas					
9	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
10	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
11	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					

Sumber: Christy Natalia Lewier (2016)

Lampiran 3
TABULASI DATA

Daftar Responden

No	JK	Usia	Pangkat / Golongan	MK	Pendidikan
1	P	44	Penata Tk.I / III.d	15	S2
2	L	35	Penata Muda / III.a	11	S1
3	L	45	Pembina Tk.I / IV.b	18	S2
4	P	40	Penata Muda / III.a	13	S1
5	L	52	Pembina Tk.I / IV.b	28	S2
6	L	34	Pengatur / II.c	10	SMA/SMK
7	L	40	Penata / III.c	16	S1
8	P	38	Penata / III.c	12	S1
9	L	52	Pembina Tk.I / IV.b	31	S2
10	P	41	Penata Muda Tk.I / III.b	14	S1
11	P	40	Penata Tk.I / III.d	12	S1
12	P	41	Penata / III.c	11	S1
13	L	57	Pembina / IV.a	28	S1
14	P	39	Penata Muda / III.a	11	S1
15	L	52	Pembina Tk.I / IV.b	30	S2
16	L	36	Penata Muda / III.a	6	S1
17	P	48	Penata / III.c	10	S1
18	P	39	Penata Muda Tk.I / III.b	11	S1
19	L	56	Pembina Tk.I / IV.b	28	S2
20	L	41	Penata Muda / III.a	6	S1
21	L	36	Penata / III.c	12	S1
22	P	40	Pengatur / II.c	11	SMA/SMK
23	L	52	Pembina Tk.I / IV.b	27	S2
24	P	41	Pengatur / II.c	11	SMA/SMK
25	L	40	Pembina Tk.I / IV.b	15	S2

26	P	40	Penata Muda Tk.I / III.b	11	S1
27	L	53	Pembina Tk.I / IV.b	23	S2
28	P	41	Penata Muda / III.a	11	S1
29	P	45	Penata / III.c	11	S2
30	L	36	Penata Muda / III.a	13	Diploma
31	L	50	Pembina Tk.I / IV.b	27	S2
32	L	38	Penata / III.c	11	S1
33	P	47	Pembina / IV.a	21	S2
34	L	39	Penata Muda / III.a	10	S1
35	L	46	Pembina Tk.I / IV.b	19	S2
36	P	38	Penata Muda / III.a	11	Diploma
37	L	45	Pembina / IV.a	15	S2
38	P	43	Penata / III.c	11	S1
39	L	54	Pembina Tk.I / IV.b	23	S2
40	L	46	Penata Muda / III.a	10	S1
41	L	50	Pembina Tk.I / IV.b	27	S2
42	P	44	Penata / III.c	11	S1
43	P	48	Pembina Tk.I / IV.b	22	S2
44	L	39	Penata Muda Tk.I / III.b	7	S1
45	L	52	Pembina / IV.a	31	S1
46	L	39	Penata Muda Tk.I / III.b	11	S1
47	L	54	Pembina Tk.I / IV.b	23	S2
48	L	39	Penata Muda / III.a	6	S1
49	L	41	Pembina / IV.a	15	S2
50	L	39	Penata Muda / III.a	7	S1
51	L	57	Pembina Tk.I / IV.b	22	S2
52	L	38	Penata Muda / III.a	11	S1
53	L	55	Pembina / IV.a	28	S1
54	P	33	Penata Muda Tk.I / III.b	10	S1
55	L	56	Pembina Tk.I / IV.b	29	S2

56	L	37	Penata / III.c	11	S1
57	L	38	Pembina / IV.a	19	S2
58	L	40	Penata Muda Tk.I / III.b	15	S1
59	L	49	Pembina Tk.I / IV.b	27	S2
60	P	35	Penata Muda Tk.I / III.b	11	S1
61	P	56	Pembina Tk.I / IV.b	21	S2
62	L	35	Penata Muda / III.a	10	S1
63	L	50	Pembina Tk.I / IV.b	31	S2
64	L	44	Penata Muda Tk.I / III.b	15	S1
65	L	49	Pembina Tk.I / IV.b	27	S2
66	P	38	Penata / III.c	10	S1
67	P	40	Pembina / IV.a	15	S2
68	P	36	Pengatur / II.c	11	SMA/SMK
69	L	51	Pembina Tk.I / IV.b	23	S2
70	P	36	Penata / III.c	10	S1
71	P	48	Pembina Tk.I / IV.b	22	S2
72	P	43	Penata / III.c	11	S1

Jawaban Responden terhadap Penyajian Laporan Keuangan

No	Penyajian Laporan Keuangan (X1)									Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	4	4	4	4	2	2	2	4	2	28
2	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	25
5	4	4	4	3	2	2	5	3	2	29
6	4	4	5	5	4	4	5	5	4	40
7	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
8	4	4	4	3	2	2	2	3	2	26
9	3	4	4	4	2	2	2	4	2	27
10	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
11	2	2	1	1	1	2	1	1	1	12
12	1	2	1	2	2	1	2	2	2	15
13	3	3	3	3	4	3	2	3	4	28
14	1	1	2	2	1	2	1	2	1	13
15	4	3	4	4	2	2	2	4	2	27
16	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
17	2	4	4	4	2	2	4	4	2	28
18	3	3	3	3	3	4	2	3	3	27
19	4	4	4	2	2	2	4	2	2	26
20	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
21	1	1	1	1	2	2	2	1	2	13
22	3	3	3	3	2	2	2	3	2	23
23	3	3	3	3	2	3	5	3	2	27
24	3	3	3	3	2	2	4	3	2	25
25	3	3	5	3	2	3	2	3	2	26
26	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
27	4	4	4	4	3	2	2	4	3	30

28	3	3	4	3	3	3	5	3	3	30
29	4	4	4	4	2	2	2	4	2	28
30	4	4	3	4	2	2	2	4	2	27
31	4	3	4	4	2	2	4	4	2	29
32	3	4	4	4	2	2	5	4	2	30
33	4	3	4	4	2	2	4	4	2	29
34	5	4	3	3	2	2	4	3	2	28
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
36	3	4	4	4	2	2	3	4	2	28
37	4	3	4	4	2	2	2	4	2	27
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
39	4	4	4	4	1	1	4	4	1	27
40	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
41	4	4	3	4	2	2	4	4	2	29
42	4	3	4	4	2	2	2	4	2	27
43	3	4	3	5	2	2	4	5	2	30
44	4	4	4	4	2	4	5	4	2	33
45	4	3	4	4	2	2	4	4	2	29
46	3	3	3	4	3	3	2	4	3	28
47	4	4	3	4	2	2	4	4	2	29
48	4	4	4	4	2	2	5	4	2	31
49	4	4	4	4	2	4	4	4	2	32
50	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
51	3	4	3	4	3	3	4	4	3	31
52	3	4	3	3	4	2	4	3	4	30
53	4	4	4	4	2	4	2	4	2	30
54	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
55	3	4	3	3	3	3	4	3	3	29
56	4	2	4	4	2	2	2	4	2	26
57	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28

58	4	4	4	4	1	1	2	4	1	25
59	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
60	3	4	4	4	2	2	5	4	2	30
61	3	3	3	4	3	3	4	4	3	30
62	4	3	4	3	2	3	2	3	2	26
63	3	4	3	4	2	2	4	4	2	28
64	4	4	3	4	2	2	4	4	2	29
65	1	2	2	2	1	1	1	2	1	13
66	4	4	4	4	3	3	4	4	3	33
67	4	4	5	5	5	4	2	5	5	39
68	3	3	3	3	4	3	2	3	4	28
69	4	5	4	4	3	2	5	4	3	34
70	3	4	3	4	2	2	5	4	2	29
71	4	4	4	4	2	2	4	4	2	30
72	4	4	4	3	2	2	2	3	2	26

Jawaban Responden terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	3	3	2	2	2	12
2	4	5	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	2	2	13
6	4	4	4	3	3	18
7	4	5	5	4	4	22
8	3	3	3	3	3	15
9	4	2	2	4	2	14
10	4	4	3	4	4	19
11	1	1	1	2	2	7
12	2	1	1	2	1	7
13	3	3	3	3	3	15
14	1	1	2	2	1	7
15	4	2	2	4	2	14
16	4	2	4	4	2	16
17	3	2	2	3	3	13
18	3	3	3	3	3	15
19	2	2	3	3	3	13
20	3	2	3	3	3	14
21	2	1	1	2	1	7
22	2	2	4	4	2	14
23	4	1	1	4	4	14
24	4	1	1	4	4	14
25	3	3	3	3	3	15
26	4	3	3	4	4	18

27	4	4	4	4	4	20
28	4	3	3	2	2	14
29	4	4	4	4	4	20
30	4	1	1	4	4	14
31	4	3	3	2	3	15
32	1	1	2	4	4	12
33	5	3	4	4	3	19
34	5	3	4	4	3	19
35	4	5	5	4	4	22
36	3	3	2	3	2	13
37	4	3	4	4	4	19
38	4	4	4	4	4	20
39	2	2	3	3	3	13
40	4	4	4	4	3	19
41	4	4	3	4	4	19
42	3	3	3	3	3	15
43	4	3	4	4	4	19
44	3	4	4	4	4	19
45	2	2	3	3	3	13
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	3	4	4	19
49	3	4	4	3	4	18
50	3	4	4	3	4	18
51	3	4	4	3	4	18
52	5	3	3	5	5	21
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	4	4	4	20
55	4	2	2	3	3	14
56	3	3	3	3	3	15

57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	4	4	4	4	4	20
60	2	2	2	4	4	14
61	2	2	2	4	4	14
62	2	2	1	4	4	13
63	1	1	2	5	5	14
64	3	2	2	3	3	13
65	1	1	2	2	1	7
66	3	4	4	4	3	18
67	4	1	1	4	4	14
68	4	1	1	4	4	14
69	4	3	4	3	4	18
70	2	1	1	4	4	12
71	3	4	4	4	3	18
72	2	2	2	4	4	14

Jawaban Responden terhadap Pengendalian Intern

No	Pengendalian Intern (X3)																		Total X3
	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3. 10	X3. 11	X3. 12	X3. 13	X3. 14	X3. 15	X3. 16	X3. 17	X3. 18	
1	2	2	4	4	2	2	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	4	4	50
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	69
3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	33
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71
5	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	33
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	70
7	4	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	70
8	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	69
9	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	32
10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71
11	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	24
12	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	28
13	4	2	2	2	4	4	2	1	2	2	2	1	2	2	4	2	2	1	41
14	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	26
15	1	4	2	2	4	1	4	2	2	2	4	1	4	4	1	4	1	1	44
16	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	69
17	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
18	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
19	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	30
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	33
21	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	28
22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	33
23	1	2	4	4	4	1	2	4	2	4	2	4	2	2	1	2	4	4	49
24	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	33
25	4	1	4	1	1	4	1	4	4	1	1	3	1	1	4	1	1	1	38
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	69

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	70
28	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	63
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	71
30	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	33
31	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	33
32	1	1	4	4	1	1	1	4	4	4	1	4	1	1	1	1	4	4	42
33	2	2	4	4	2	1	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	4	4	49
34	2	2	4	4	2	1	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	4	4	49
35	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	34
36	4	2	4	1	4	4	2	4	2	1	2	4	2	2	4	2	1	1	46
37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	35
38	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	69
39	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	27
40	2	2	2	1	4	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	33
41	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	2	1	2	2	2	2	4	4	45
42	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	46
43	2	2	2	4	1	2	2	2	2	4	2	1	2	2	2	2	4	4	42
44	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
45	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	4	33
46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	35
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
48	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	70
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
52	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	1	2	2	2	43
53	4	2	4	1	4	4	2	4	2	1	2	4	2	2	4	2	1	1	46
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
55	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
56	4	3	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	4	3	4	4	1	2	59

57	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	46
58	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	27
59	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
60	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	44
61	4	2	1	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	43
62	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	44
63	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
64	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
65	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	26
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
68	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	34
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	71
70	4	1	2	2	4	4	1	2	2	2	1	2	1	1	4	1	2	2	38
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	71
72	4	2	1	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	43

58	1	2	5	5	1	2	4	5	5	2	5	25
59	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	29
60	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	18
61	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	18
62	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	18
64	4	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	24
64	4	2	2	2	4	2	4	2	2	2	2	22
65	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	10
66	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	36
67	5	2	3	3	5	2	3	3	3	3	3	26
68	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	22
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	18
71	4	3	5	5	4	3	5	5	4	4	4	34
72	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	18

Lampiran 4
OUTPUT SPSS VERSI 25

1. DESKRIPSI RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-Laki	44	61,1	61,1	61,1
	Perempuan	28	38,9	38,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Magister (Strata2)	29	40,3	40,3	40,3
	Sarjana (Strata1)	37	51,4	51,4	91,7
	Diploma (D3)	2	2,8	2,8	94,4
	SMA/SMK	4	5,6	5,6	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa Kerja			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	5 – 10 Tahun	13	18,1	18,1	18,1
	11 – 15 Tahun	32	44,4	44,4	62,5
	16 – 20 Tahun	4	5,6	5,6	68,1
	> 20 Tahun	23	31,9	31,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan	72	12	40	28,26	5,222
Aksesibilitas Laporan Keuangan	72	7	22	15,64	3,655
Pengendalian Intern	72	24	72	47,96	16,521
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	72	10	36	23,58	6,178
Valid N (listwise)	72				

3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN

a. Uji Validitas

Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,677**	,707**	,617**	,167	,197	,278*	,617**	,167	,699**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,160	,098	,018	,000	,160	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.2	Pearson Correlation	,677**	1	,593**	,654**	,228	,140	,483**	,654**	,228	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,055	,240	,000	,000	,055	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.3	Pearson Correlation	,707**	,593**	1	,687**	,245*	,292*	,291*	,687**	,245*	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,038	,013	,013	,000	,038	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.4	Pearson Correlation	,617**	,654**	,687**	1	,256*	,214	,364**	1,000**	,256*	,799**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,030	,072	,002	,000	,030	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.5	Pearson Correlation	,167	,228	,245*	,256*	1	,700**	,112	,256*	1,000**	,636**
	Sig. (2-tailed)	,160	,055	,038	,030		,000	,348	,030	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.6	Pearson Correlation	,197	,140	,292*	,214	,700**	1	,101	,214	,700**	,569**
	Sig. (2-tailed)	,098	,240	,013	,072	,000		,397	,072	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.7	Pearson Correlation	,278*	,483**	,291*	,364**	,112	,101	1	,364**	,112	,555**
	Sig. (2-tailed)	,018	,000	,013	,002	,348	,397		,002	,348	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.8	Pearson Correlation	,617**	,654**	,687**	1,000**	,256*	,214	,364**	1	,256*	,799**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,030	,072	,002		,030	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.9	Pearson Correlation	,167	,228	,245*	,256*	1,000**	,700**	,112	,256*	1	,636**
	Sig. (2-tailed)	,160	,055	,038	,030	,000	,000	,348	,030		,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Total X1	Pearson Correlation	,699**	,748**	,751**	,799**	,636**	,569**	,555**	,799**	,636**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,522**	,432**	,376**	,335**	,730**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,004	,000
	N	72	72	72	72	72	72
X2.2	Pearson Correlation	,522**	1	,862**	,181	,322**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,128	,006	,000
	N	72	72	72	72	72	72
X2.3	Pearson Correlation	,432**	,862**	1	,206	,237*	,797**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,083	,045	,000
	N	72	72	72	72	72	72
X2.4	Pearson Correlation	,376**	,181	,206	1	,728**	,610**
	Sig. (2-tailed)	,001	,128	,083		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72
X2.5	Pearson Correlation	,335**	,322**	,237*	,728**	1	,666**
	Sig. (2-tailed)	,004	,006	,045	,000		,000
	N	72	72	72	72	72	72
Total X2	Pearson Correlation	,730**	,839**	,797**	,610**	,666**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.12	Pearson Correlation	,587**	,615**	,886**	,552**	,474*	,526**	,623**	,938**	,575**	,552**	,641**	1	,623**	,615**	,546**	,641**	,572**	,603**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.13	Pearson Correlation	,623**	,971**	,669**	,606**	,630*	,637**	,977**	,669**	,709**	,577**	,983**	,623**	1	,971**	,637**	,983**	,559**	,581**	,915**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.14	Pearson Correlation	,616**	1,000*	,663**	,622**	,613*	,630**	,983**	,663**	,713**	,592**	,978**	,615**	,971**	1	,630**	,978**	,586**	,597**	,918**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.15	Pearson Correlation	,948**	,630**	,535**	,331**	,642*	,969**	,637**	,545**	,550**	,316**	,643**	,546**	,637**	,630**	1	,643**	,313**	,323**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,005	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000	,000	,000	,000		,000	,007	,006	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.16	Pearson Correlation	,630**	,978**	,675**	,613**	,625*	,643**	,983**	,675**	,705**	,585**	,989**	,641**	,983**	,978**	,643**	1	,566**	,588**	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.17	Pearson Correlation	,328**	,586**	,568**	,941**	,297*	,271*	,559**	,579**	,689**	,932**	,566**	,572**	,559**	,586**	,313**	,566**	1	,947**	,742**

	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,000	,011	,021	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000		,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
X3.18	Pearson Correlation	,317**	,597**	,589**	,952**	,275*	,281*	,581**	,621**	,689**	,932**	,588**	,603**	,581**	,597**	,323**	,588**	,947**	1	,756**	
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,000	,019	,017	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,006	,000	,000		,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Total X3	Pearson Correlation	,744**	,918**	,809**	,765**	,658*	,728**	,916**	,823**	,809**	,747**	,922**	,793**	,915**	,918**	,743**	,921**	,742**	,756**	1	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000	,010	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.10	Pearson	,494*	,503*	,411*	,411*	,494*	,503*	,437*	,411*	,599*	1	,599*	,613**
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.11	Pearson	,302*	,453*	,806*	,806*	,302*	,453*	,655*	,806*	1,00	,599*	1	,739**
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	0**	*		
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000	,010	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Total Y	Pearson	,610*	,815*	,824*	,824*	,610*	,815*	,759*	,824*	,739*	,613*	,739*	1
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Penyajian Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,847	9

Uji Reliabilitas Aksesibilitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,784	5

Uji Reliabilitas Pengendalian Intern

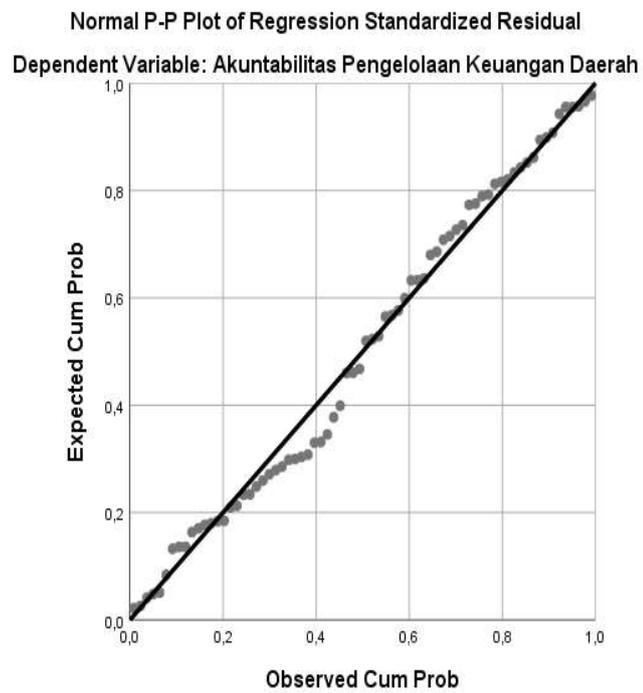
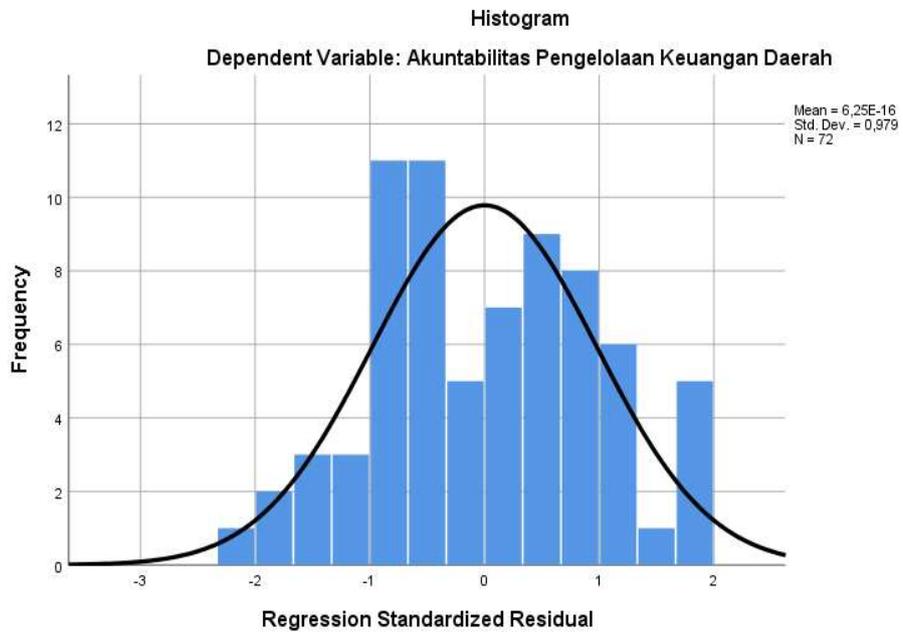
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,969	18

Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,922	11

4. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,05764252
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,056
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

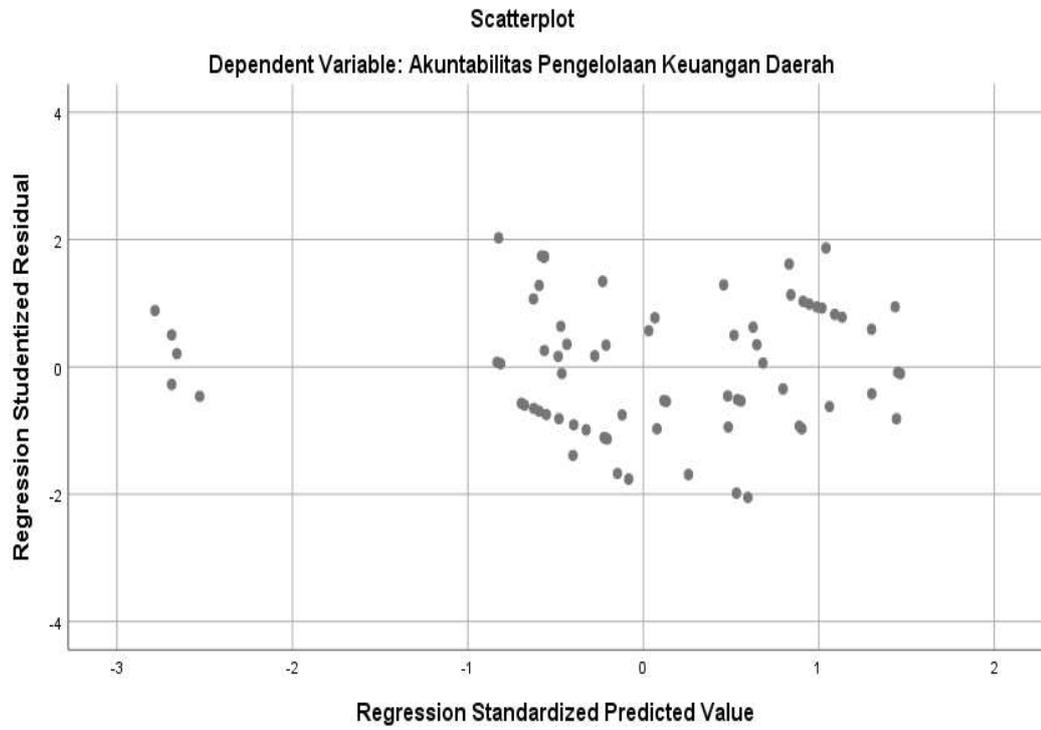
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardize d Coefficients		Standar dized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolera nce	VIF
1 (Constant)	,152	2,727		,056	,956		
Penyajian Laporan Keuangan	,302	,139	,256	2,183	,032	,463	2,161
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,738	,195	,437	3,782	,000	,475	2,103
Pengendalian Intern	,070	,034	,186	2,021	,047	,749	1,336

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Uji Heteroskedastisitas



5. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,152	2,727		,056	,956
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	,302	,139	,256	2,183	,032
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	,738	,195	,437	3,782	,000
	Pengendalian Intern	,070	,034	,186	2,021	,047

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1540,523	3	513,508	29,871	,000 ^b
	Residual	1168,977	68	17,191		
	Total	2709,500	71			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,754 ^a	,569	,550	4,146

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhayati
Tempat / Tanggal Lahir : Majene / 10 November 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Telepon / HP : 085397224767
Email : hayati447@gmail.com
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Rumah : a. Jalan : Jl. Husni Tamrin
b. Kelurahan / Desa : Rimuku
c. Kecamatan : Mamuju
d. Kabupaten / Kota : Mamuju
e. Provinsi : Sulawesi Barat
Kegemaran (Hobby) : Nonton Drama Korea
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Riwayat Pekerjaan : a. Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2008 s/d 2016
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2017 sampai sekarang
Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No.2 Majene Tahun 1999
b. SMP Negeri 2 Majene Tahun 2001
c. SMK Negeri 2 Majene Tahun 2004
d. STIE YAPMAN Majene Tahun 2008

Makassar, 2021
Yang membuat,

Nurhayati
2019MM12269



LOA (Letter of Acceptance)

No. 270/JMMNI/IX/2021

Dewan penyunting **Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia** telah menerima artikel,

Nama : Nurhayati (Penulis 1)

Maryadi (Penulis 2)

Sylvia Sjarlis (Penulis 3)

Judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Asal Instansi : Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

Program Studi : Manajemen

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diterima** dan **akan diproses** sesuai Prosedur Penulisan **Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia**. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Makassar, 21 September 2021

Penanggung Jawab Jurnal

Managing Editorial

Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M